

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi adalah salah satu cara bagi daerah untuk dapat melaju ke tahap perekonomian yang lebih maju. Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah mendapat kelimpahan tanggung jawab dan kewenangan dari pusat dalam bentuk desentralisasi, sehingga daerah bisa memaksimalkan pembangunan ekonominya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai kebutuhan dan prioritasnya masing-masing.

Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut maka membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban yang proporsional, adil, demokratis dan transparan atas penggunaan dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya ini tentunya tak lepas dari peran serta tanggung jawab berbagai pihak mulai dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pengguna anggaran, pihak swasta yang juga menanamkan investasi ke daerah, bahkan peran masyarakat luas yang juga memegang peran penting dalam sebuah demokrasi ekonomi. Pendanaan pembangunan daerah terdapat pada belanja yang dilakukan daerah untuk dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan

yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Agar terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif salah satu komponen yang diandalkan adalah belanja daerah. Bila dibandingkan dengan investasi swasta, anggaran belanja daerah nilainya relatif kecil. Meskipun demikian, dana tersebut mempunyai peranan strategis karna sasaran penggunaannya untuk membiayai sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

Belanja daerah menurut kelompoknya terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan daerah. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan program. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode.

Bentuk penggunaan SiLPA ada dua, yakni:

1. Untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran) dan
2. Membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni.

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Hasan, 2012). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat. Dapat dikatakan, bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya.

Dari penelitian ini, penulis akan membahas perekonomian Provinsi Gorontalo. Wilayah Provinsi Gorontalo yang pada zaman kolonial Belanda dikenal dengan sebutan "Semenanjung Gorontalo" (Gorontalo Peninsula) terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya pada  $0^{\circ} 19' 00''$  -  $1^{\circ} 57' 00''$  LU (Lintang Utara) dan  $121^{\circ} 23' 00''$  -  $125^{\circ} 14' 00''$  BT (Bujur Timur). Letak Provinsi Gorontalo sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara.

Dalam catatan sejarah maritim Nusantara, Laut Sulawesi menjadi penting karena merupakan jalur pelayaran dari Pulau Sulawesi menuju Filipina yang juga melalui jalur wilayah perairan Kesultanan Sulu di sebelah Timur dari Negara Malaysia. Sedangkan Teluk Gorontalo atau Teluk Tomini sejak dahulu kala menjadi sumber kehidupan penduduk kerajaan-kerajaan yang bermukim di sekitarnya. Teluk ini pun sejak dahulu ramai oleh lalu lintas pelayaran dan perdagangan, karena menjadi tempat bertemunya kerajaan yang berada di kawasan "Tomini-Bocht" (wilayah kawasan Teluk Tomini), Ternate, Buton, bahkan menjadi jalur masuknya perantau dari Hokkian (Tiongkok) serta dari Jazirah Arab.

Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Luas Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah  $12.435 \text{ km}^2$ .

Dibandingkan terhadap wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,63%. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu :

1. Kabupaten Boalemo,
2. Kabupaten Gorontalo,
3. Kabupaten Pohuwato,
4. Kabupaten Bone Bolango,
5. Kabupaten Gorontalo Utara, dan
6. Kota Gorontalo.

Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas area sebesar 35,83%, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo sebesar 0,53%. Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo merupakan Gunung terendah. Disamping memiliki banyak gunung, provinsi ini juga dilintasi banyak sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo dengan panjang aliran 136 km.

Menurut Badan Pusat Statistika perekonomian Provinsi Gorontalo sepanjang 2019 diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp 41.151 Miliar serta PDRB per kapita mencapai Rp 34,22 Juta. Ekonomi Gorontalo tahun 2019 tumbuh 6,41 persen, lebih lambat dibanding tahun 2018 yang sebesar 6,50 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 13,61 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,93%.

Struktur ekonomi Gorontalo tahun 2019 dari sisi produksi didominasi oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,93%. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 61,80%. PDRB menurut lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi kumulatif Gorontalo selama tahun 2019 tumbuh sebesar 6,41%. Pertumbuhan kumulatif tertinggi dicapai oleh Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 13,61%. Pertumbuhan kumulatif tertinggi selanjutnya adalah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,88% serta Kategori Industri Pengolahan sebesar 11,62%.

Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 masih didominasi oleh ketiga lapangan usaha utama yakni: Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (38,93%); Kategori Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,42%); serta Kategori Konstruksi (10,67%). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2019, Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,37%; diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,34%; dan Kategori Industri Pengolahan sebesar 0,45%.

Perekonomian Gorontalo tahun 2018 diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp 37.736 Miliar serta PDRB per kapita mencapai Rp 31,83 Juta. Ekonomi Gorontalo tahun 2018 tumbuh 6,51% lebih lambat dibanding tahun 2017 yang sebesar 6,73%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 12,90%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 13,83%.

Struktur ekonomi Gorontalo tahun 2018 dari sisi produksi didominasi oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,66%. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 61,59%. PDRB menurut lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi kumulatif Gorontalo selama tahun 2018 tumbuh sebesar 6,51%.

Pertumbuhan kumulatif tertinggi dicapai oleh Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 12,90%. Pertumbuhan kumulatif tertinggi selanjutnya adalah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,06% serta Kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,82%.

Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 masih didominasi oleh ketiga lapangan usaha utama tetapi terjadi pergeseran pada urutan kedua dan ketiga, yakni: Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (38,66%); Kategori Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (11,83%); serta Kategori Konstruksi (11,12%). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2018, Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,83 persen; diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,10 persen; dan Kategori Jasa Pendidikan sebesar 0,39 persen.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Belanja Langsung berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo?
2. Bagaimana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ada pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui bagaimana ada pengaruh SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini :

1. Pemerintah diharapkan mengalokasikan belanja daerah secara proporsional antara belanja rutin yang konsumtif dengan belanja pembangunan yang lebih memihak kepentingan publik sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan dan memperpanjang periode waktu penelitian serta dapat menggunakan beberapa variabel terkait lainnya yang mungkin dapat dijadikan sebagai faktor naik turunnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih uptodate, baik, jelas, dan akurat.
3. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Strata 1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Serta dapat menambah pengetahuan dan mengaplikasikan secara langsung dengan menghadapi kondisi secara nyata dilapangan dan mengasah kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dengan metode ilmiah.